



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Jln. Tandurusa PO. BOX 18/Bt. - Kel. Aertembaga Dua - Bitung - Sulawesi Utara - 95526

Telp : (0438) 21650, 21681 Fax : (0438) 31477; e-mail : bppp_aertembaga@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN BITUNG
NOMOR: 21/BRSDM-BPPP.BTG/KPTS/KP/120/VI/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa untuk mendukung sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur; serta rencana strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2020-2024.

Mengingat

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan pedoman dalam pengelolaan tugas dan fungsi PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, merupakan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan di Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, merupakan amanat yang diberikan kepada KKP untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan kegiatan perikanan serta menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan masterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, merupakan dasar untuk pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan perikanan;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, merupakan pedoman terkait kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penyuluh perikanan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, merupakan pedoman peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan secara mandiri yang sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan pasar tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 12/MEN-SJ/KP.430/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian dari dan

Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Setara Eselon III di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

14. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Per-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;
15. Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor : SK.434/BRSDM.05/RC.221/V/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2020–2024

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2020–2024, yang selanjutnya disebut Renstra BPPP Bitung, adalah dokumen perencanaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. BPPP Bitung adalah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.

Pasal 2

- (1) Renstra BPPP Bitung merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan Tahun 2020 – 2024.

- (2) Renstra BPPP Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra BPPP Bitung, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis serta isu-isu strategis;
- b. Tujuan dan Sasaran Strategis;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan ketenagaan;
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. Penutup.

Pasal 4

Renstra BPPP Bitung merupakan pedoman yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Kerangka Pendanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 3 Juni 2020

Kepala Balai,



Ahmad Ridloudin

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung
Nomor 21/BRSDM-BPPP.BTG/KPTS/KP/120/VI/2020
Tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2020-2024 telah selesai dengan baik. Renstra ini dibuat dengan mengacu pada Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024, Rencana Strategis BRSDMKP tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 yang disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BPPP Bitung dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya Renstra ini.

Masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa yang akan datang.

Demikian Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BPPP Bitung dan kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bitung, 3 Juni 2020

Kepala Balai,



Ahmad Ridloudin

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi

tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.

SDM yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perikanan. SDM yang dimaksudkan dalam hal ini tentu adalah pelaku utama perikanan. Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dibawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaku utama perikanan. Penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

B. Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan

perikanan periode 2020–2024. Penyusunan Renstra BPPP Bitung mengacu kepada:

- 1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025;
- 3) Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
- 4) Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024; Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024.

Renstra BPPP Bitung berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, sumberdaya manusia, capaian program dan kegiatan pada periode sebelumnya (2015 – 2019), tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja dan kerangka pendanaan.

C. Kondisi Umum

1. Organisasi

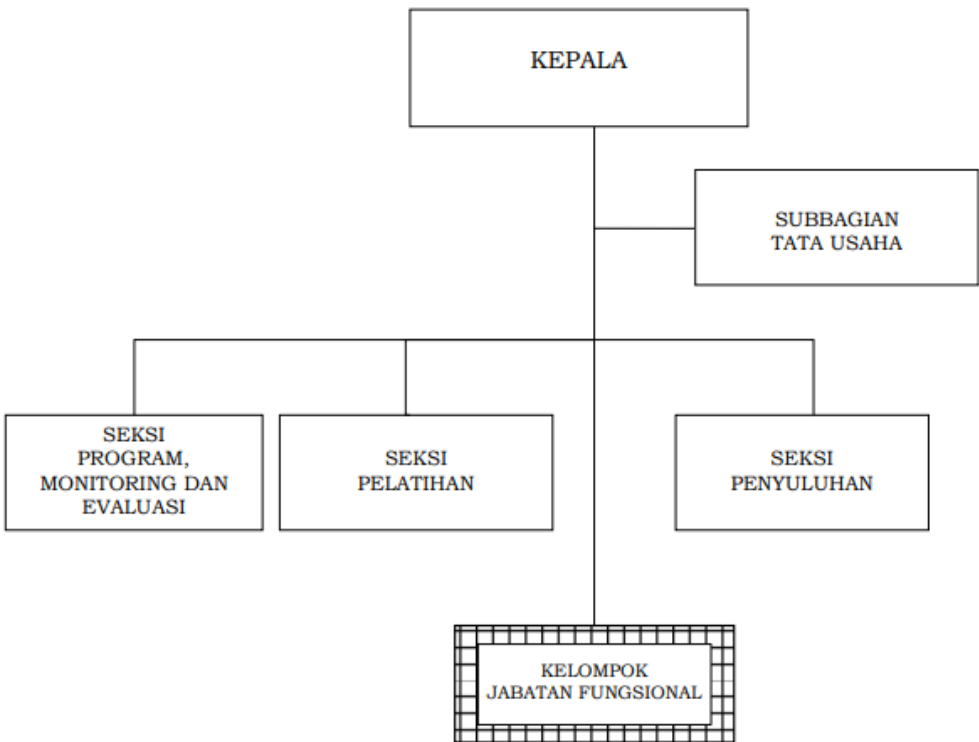
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BPPP Bitung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPP Bitung menyelenggarakan berbagai fungsi yaitu :

- 1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- 2) Penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 4) Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- 5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- 6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi BPPP Bitung terdiri atas : Subbagian Tata Usaha; Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi; Seksi Pelatihan; Seksi Penyuluhan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Struktur organisasi BPPP Bitung disajikan dalam Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar1. Struktur Organisasi BPPP

2. Sumberdaya Manusia

BPPP Bitung memiliki pegawai sebanyak 434 orang pada tahun 2020, yang terdiri dari 274 orang PNS dan 160 orang tenaga kontrak. Adapun PNS terdiri dari 244 orang pegawai fungsional dan 30 orang pegawai struktural, sedangkan untuk tenaga kontrak terdiri dari 12 orang tenaga kontrak dan 148 orang penyuluh perikanan bantu (PPB).

Adapun pegawai fungsional terdiri dari fungsional widyaiswara, fungsional instruktur, dan penyuluh perikanan. Sebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pegawai dalam Jabatan Fungsional BPPP Bitung, 2020

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Penyuluh perikanan	226
2	Instruktur	11
3	Widyaiswara	5
	Jumlah	242

Sumber Data : Kepegawaian BPPP Bitung

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat, sehingga BPPP Bitung ditugaskan menjadi Satminkal penyuluh perikanan untuk 6 Provinsi. Jumlah penyuluh perikanan PNS sampai dengan bulan Mei 2020 di BPPP Bitung sebanyak 226 orang dan PPB sebanyak 148 orang, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah SDM Penyuluh Perikanan PNS

No.	PROVINSI	PNS	PPB
1	Kalimantan Utara	27	22
2	Sulawesi Utara	79	46
3	Sulawesi Tengah	76	53
4	Gorontalo	44	27
	Jumlah	226	148

** Data s.d. Bulan Mei 2020
(Sumber: Seksi Penyuluhan BPPP Bitung)*

3. Capaian Program dan Kegiatan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung sampai dengan saat ini telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM KP dengan capaian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelatihan

BPPP Bitung telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan dimaksud mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, program Bantuan Pemerintah, Program SKPT, Peningkatan Produksi Garam, Program Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan program prioritas lainnya.

Jumlah lulusan pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 11.983 orang (8.983 orang lulusan pelatihan dan 3.000 orang yang telah mengikuti Bimtek). Adapun capaian kegiatan pelatihan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019, disajikan ke dalam tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Lulusan Pelatihan Masyarakat dan BIMTEK Tahun 2015–2019 per Provinsi dalam Wilayah Kerja BPPP Bitung

No	Provinsi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kalimantan Timur	100	150	60	180	600
2	Kalimantan Utara	90	60	150	191	31
3	Sulawesi Utara	760	1.911	507	581	554
4	Sulawesi Tengah	190	195	30	328	293
5	Sulawesi Selatan	940	770	129	490	1.561
6	Gorontalo	430	223	61	120	298
Jumlah		2.510	3.309	937	1.890	3.337

Sumber Data : Seksi Pelatihan BPPP Bitung

2) *Sertifikasi Kompetensi*

Jumlah Sertifikasi kompetensi yang telah dihasilkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 6.166 orang. Data sertifikasi kompetensi mulai tahun 2015–2019 disajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM KP Tahun 2015 – 2019

NO.	Tahun	Purnawidya		Industri		Jumlah		Total
		Realisasi		Realisasi		K	BK	
		K	BK	K	BK			
1	2015	2.862	58	-	-	2.862	58	2.920
2	2016	1.678	252	60	-	1.738	252	1.990
3	2017	139	7	857	25	996	32	1.028
4	2018	-	-	-	-	-	-	-
5	2019	-	-	570	-	570	-	570
JUMLAH		4.679	317	917	25	6.166	342	5.938

Sumber Data : Seksi Pelatihan BPPP Bitung

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BRSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Bitung pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP, visi BRSDM dan visi Puslatluh KP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.2 Misi

Misi BPPP Bitung adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BRSDMKP dan Puslatluh KP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

- 1) Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standar;
- 2) Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar;
- 3) Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional;
- 4) Peserta latih yang kompeten;
- 5) Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya;
- 6) Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai BRSDMKP pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SS1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS4 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS5 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BRSDMKP adalah sebagai berikut :

- SS1 Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- SS2 Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan
- SS3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- SS4 Tatakelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BRSDMKP tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang akan dicapai BPPP Bitung pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP, BRSDMKP dan Puslatluh KP adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
- Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat
- Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan
- Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya, BPPP Bitung mengacu pada Puslatluh KP yaitu menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

- Kelompok pelaku utama/ usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Bitung adalah sebanyak 3,298 kelompok pada tahun 2020 dan meningkat sebanyak 100 kelompok setiap tahunnya s.d 2024;
- Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Bitung sebanyak 148 kelompok untuk tahun 2020 s.d 2024;
- Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Bitung sebanyak 158 kelompok untuk tahun 2020 s.d 2024.

Costumer Perspective

- Jumlah desa mitra/ kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP sebanyak 1 desa setiap tahunnya dari tahun 2020 s.d 2024.

Internal Process Perspective

- Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung adalah sebanyak 60 orang pada tahun 2020 dan tahun 2021, 65 orang pada tahun 2022, 70 orang pada tahun 2023 dan 75 orang pada tahun 2024;
- Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Bitung sebanyak 25 orang pada tahun 2020, 105 orang pada tahun 2021, 115 orang pada tahun 2022, 125 orang pada tahun 2023 dan 155 orang pada tahun 2024;
- SDM KP yang dilatih di BPPP Bitung adalah sebanyak 1,520 orang pada tahun 2020, sebanyak 2,640 orang pada tahun 2021, sebanyak 2,745 orang pada tahun 2022, sebanyak 2,847 orang pada tahun 2023 dan sebanyak 3,050 orang pada tahun 2024;
- Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung sebanyak 597 orang pada 2021, sebanyak 743 orang pada tahun 2022, sebanyak 971 orang pada tahun 2023, dan sebanyak 1,140 orang pada 2024;
- Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Bitung sebanyak 1 unit pada tahun 2020, sebanyak 4 unit pada tahun 2021, sebanyak 5 unit pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 6 unit pada tahun 2024;

- Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung adalah sebanyak 1 unit setiap tahunnya dari tahun 2020 s.d 2024;
- Sertifikasi kelembagaan pelatihan dan penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Bitung adalah 1 lembaga setiap tahunnya dari tahun 2020 s.d 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome melalui Sasaran strategis ke empat (SS-4) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja :

- Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Bitung adalah 72
- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung adalah 82%
- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Bitung adalah Baik (nilai: 88)
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2019 adalah 1%
- Nilai kinerja anggaran BPPP Bitung adalah 85

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan

A. Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat yang ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
- c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
- d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis digital talent untuk menghasilkan startup di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online training*).

Pelatihan dimaksudkan untuk Pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dan mempunyai arah untuk: (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional sektor KP, antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut Permen KP tentang Lobster, memerlukan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan budidaya lobster;
- b. Dukungan pelatihan terhadap strategi peningkatan produksi budidaya udang, dengan menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan budidaya udang, pelatihan pembuatan pakan, dan membangun sdm budidaya udang;
- c. Strategi pencegahan dan penyebaran sampah plastik, pelatihan penanganan dan pengelolaan sampah plastik;
- d. Membuat prototipe miniplant solar refrigeraton, yaitu membuat pabrik es sederhana (berfungsi sebagai cold storage dan ice flake machine) dengan sumber energi tenaga surya untuk diintegrasikan sebagai sarana pengawetan produk perikanan disentra-sentra pemasaran ikan;

- e. Pelatihan kepada pelaku utama penerima bantuan pemerintah dari eselon I teknis, sebagai upaya untuk mengefektifkan bantuan bantuan yang telah diterima oleh masyarakat;
- f. Pelatihan lainnya nanti yang dibutuhkan untuk mendukung isu-isu strategis nasional yang ada di sektor kelautan dan perikanan.

B. Penyuluhan KP

Penataan kembali sistem penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;

- Peningkatan kelas kelompok mandiri
- Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
- Penempatan dan penyebaran penyuluh di sekretariat penyuluhan di kab/kota
- Membuat piramida model penyuluh (PNS, PPB dan Penyuluh Swadaya)

b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;

- Peningkatan daya saing penyuluh PNS
- Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB)
- Pembinaan Penyuluh Perikanan swadaya

c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;

- Pengembangan materi *cyber extention*
- Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
- Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
- Membangun Sistem Penyuluhan Digital, yang memuat sistem absensi, sistem pelaporan kinerja, dan sistem konsultasi/pendampingan
- Membangun sistem penilaian kinerja penyuluh PNS, P3K & Swadaya berbasis lokasi (gps)
- Membangun standar *digital library*, dengan memuat modul-modul yang lengkap sehingga penyuluhan dapat menjadi *Pool knowledge*

d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

- Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
- Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
- Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan

- Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
- Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
- Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

3.2 Strategi

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

Strategi 1: Membangun sistem penyuluhan KP yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM serta program eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

Langkah Operasional:

1. Penguatan kelembagaan pelaku usaha/masyarakat kelautan dan perikanan (penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok);
2. Menyiapkan Programa Penyuluhan Perikanan yang partisipatif, kolaboratif dan integral;
3. Mendiseminasikan inovasi hasil riset teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
4. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan kelautan dan perikanan berbasis online;
5. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan berbasis kebutuhan inovasi teknologi adaptif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
6. Mengidentifikasi dan memetakan teknologi kelautan dan perikanan yang dibutuhkan pelaku utama kelautan dan perikanan;
7. Menyiapkan NSPK Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
8. Menyusun materi penyuluhan berbasis hasil riset inovatif;
9. Melakukan penguatan sarana prasarana penyuluhan
10. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan melalui Pos Penyuluhan;
11. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha;
12. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan KP;
13. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui Penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh;
14. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama KP;
15. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web;

Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan Temu: aplikasi, percontohan, dll.

Sasaran Strategis 2 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

Strategi 1: Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan

Langkah Operasional:

1. Memanfaatkan teknologi terapan dalam mendukung percepatan industrialisasi KP;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dan diseminasi teknologi yang direkomendasikan dan inovasi teknologi adaptif lokasi;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan hasil kajian kebijakan (*policy brief*) dalam merespon isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang sedang dan potensial berkembang;
4. Membuat percontohan penyuluhan di lokasi binaan penyuluhan yang menerapkan teknologi inovasi hasil riset;
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendiseminasi hasil riset yang disesuaikan dengan teknologi adaptif lokasi.

Sasaran Strategis 3 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pelatihan berbasis kerjasama industri

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pelatihan yang membentuk startup/wirausaha baru;
2. Melaksanakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan;
3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Mengembangkan Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat;
5. Mengembangkan modul, kurikulum pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan;

7. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan diklat;
8. Meningkatkan dan mengembangkan jenis dan metode pelatihan berbasis kinerja/kompetensi.

Strategi 2: Membangun sistem pelatihan dan penyuluhan KP berbasis digital/Teknologi Informasi

Langkah operasional:

1. Mengembangkan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh *e-learning*, *online training* dan skema *blended training* (gabungan online training dan klasikal);
2. Menyusun NSPK pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital;
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pelatihan dan penyuluhan KP digital;
4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi;
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (*e-learning*, dan *e-training*).

Sasaran Strategis 4 : Tatakelola pemerintahan yang baik

Strategi : Membangun dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Puslatluh KP

Langkah Operasional :

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan;
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM;
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel;
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan KP, kegiatan prioritas Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2020- 2024, adalah :

a. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada:

- 1) Pelatihan Masyarakat KP
- 2) Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3) Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
- 5) Pelatihan Teknis Fungsional KP
- 6) Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP
- 7) Sarana Prasarana Pelatihan KP

b. Penyuluhan KP

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada :

- 1) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
- 2) Penguatan kelembagaan kelompok KP
- 3) Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP
- 4) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan
- 5) Sarana prasarana penyuluhan KP

BAB IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran Strategis Program Pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Rincian Indikator Kinerja BPPP Bitung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Bitung (kelompok)	3,298	3,398	3,438	3,598	3,698
		Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya di Satminkal BPPP Bitung (kelompok)	148	148	148	148	148
		Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Bitung (kelompok)	158	158	158	158	158
2	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (orang)	60	60	60	65	70
		Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Bitung (orang)	25	105	115	125	155
		SDM KP yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	1,520	2,640	2,745	2,847	3,050
		Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	0	597	743	971	1,140
		Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Bitung (unit)	1	4	5	5	6
		Sarana dan prasarana Puslatluh yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1	1	1	1	1
		Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat di BPPP Bitung (lembaga)	1	1	1	1	1
4	Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Jumlah desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP	1	1	1	1	1
5	Tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Bitung (indeks)	72	72	72	72	72
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	82	82	82	82	82
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
		Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2019 (%)	1	1	1	1	1
		Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	85	85	85	85	85

Program kegiatan kerja BPPP Bitung sesuai rencana strategis tahun 2020-2024 adalah pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan kegiatan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi masyarakat Kelautan dan perikanan;
- 2) Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pendampingan melalui penyuluhan kepada pelaku utama/usaha;
- 4) Dukungan operasional Penyuluh Perikanan yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat KP;
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan penyuluhan;
- 6) Layanan Perkantoran;
- 7) Dokumen Perencanaan, terdiri dari Penyusunan Rencana Kerja, KAK, RAB, dan RKAKL, Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Koordinasi perencanaan program dengan instansi terkait, Sistem informasi, Publikasi, dan Pameran.
- 8) Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi, terdiri dari Monitoring Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan, Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP, dan Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.
- 9) Dokumen Ketatausahaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara, kegiatan terdiri dari Penyusunan laporan

Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Persuratan, dan PBJ.

- 10) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan, kegiatan ini terdiri dari Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Implementasi SIMPEG.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

BPPP Bitung melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP, Puslatluh KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020–2024 dan PNPB Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020-2024 dan perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020. Rencana Strategis BPPP Bitung ini disusun untuk memberikan pedoman atau panduan sesuai dengan perkembangan arah kebijakan dan peraturan terkait dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPP Bitung dalam melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.